

## **Akuntabilitas Keuangan Daerah Ditinjau dari Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur serta Dampaknya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

**Faturahman**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

\*Corresponding Author:

**Faturahman**

[faturahman@uinjambi.ac.id](mailto:faturahman@uinjambi.ac.id)

### **ABSTRACT**

---

*The purpose of this study was to analyze the effect of internal control and government employee competencies on regional financial accountability, and its impact on the accountability of the performance of government agencies in the city of Jambi. The type of data used is primary and secondary data. Population and sample are all government units (SKPD) in Jambi City which have government performance accountability report (LAKIP) value. Data were analyzed using path analysis. The results showed that Internal Control and Government Employee Competence significantly influence Regional Financial Accountability. Furthermore, Internal Control has a greater indirect effect when compared to the direct effect on the Accountability of Government Units Performance. While Employee Competence has a greater direct effect when compared to the indirect effect on the Accountability of Government Institution Performance.*

**Keywords:** *Internal Control; Government Employee Competency; Accountability; Government Performance Accountability Report (LAKIP); Regional government*

---

Received  
11-01-2020

Received in revised form  
09-05-2020

Accepted  
27-05-2020

---

## ABSTRAK

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengendalian intern dan kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas keuangan daerah, serta dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Jambi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Populasi dan sampel adalah semua SKPD di Kota Jambi yang memiliki nilai LAKIP. Data dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Selanjutnya, Pengendalian Intern memiliki pengaruh tidak langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh langsung terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Kompetensi Pegawai memiliki pengaruh langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Kata kunci:** Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, LAKIP, Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan proses pelaksanaan fungsi manajemen yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan adanya pengendalian internal yang memadai sehingga dapat menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memiliki nilai handal, efisien dan efektif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik akuntabilitas keuangan, akuntabilitas proses, maupun akuntabilitas prosedural.

Sejak bergulirnya era reformasi yang sampai dengan saat ini sudah berjalan dua dasawarsa, terutama dalam reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 terdapat 5.858 temuan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Interna (SPI). Secara rinci, kelemahan atas SPI ini terdiri dari 1.826 temuan kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.753 temuan kelemahan pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.279 temuan kelemahan pada struktur pengendalian intern (BPK RI, 2019a).

Permasalahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) salah satunya ditemukan oleh BPK atas LKPD Kota Jambi tahun 2018, yaitu temuan atas kesalahan penganggaran belanja modal sebesar Rp41,61 miliar, pengendalian atas pembayaran

belanja tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD tidak memadai, serta penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak sesuai ketentuan (BPK RI, 2019b)

Selain pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pemerintah daerah melalui instansi-instansi yang ada juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja non keuangan secara periodik untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan pertanggungjawaban ini tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penilaian akuntabilitas kinerja yang diperoleh pemerintah Kota Jambi dari Menpan RB melalui nilai SAKIP tahun 2015-2016 hasil evaluasi kinerja hanya memperoleh predikat CC atau cukup dengan nilai 50,19 dan 50,68. Sedangkan dalam tahun 2017-2018 ada peningkatan tetapi tidak signifikan menjadi B atau baik dengan nilai 60,10 dan 67,76. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah Kota Jambi dengan segala upaya agar akuntabilitas kinerja dapat mengalami peningkatan.

## TINJAUAN LITERATUR

### Akuntabilitas Keuangan Daerah

Prinsip tanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Halim, 2007). Perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Bagi pemerintah daerah, pengelolaan keuangan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan (Mahmudi, 2010). Proses pengelolaan keuangan daerah diawali dari penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD (Adisasmita, 2011).

### Pengendalian Intern

Pengendalian intern menurut SPAP merupakan proses yang dijalankan jajaran manajemen dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan kepatuhan yang berlaku (Halim, 2008). Sedangkan COSO mengartikan pengendalian intern sebagai proses yang dipengaruhi oleh jajaran manajemen perusahaan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai dalam pencapaian tujuan perusahaan, yang digolongkan menjadi 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan aktivitas pemantauan (*monitoring activities*) (Arens et al., 2008).

## **Kompetensi Aparatur**

Salah satu faktor penting untuk menyusun pelaksanaan otonomi daerah adalah ketersediaan SDM aparatur pemerintah yang berkemampuan dan professional termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Istilah aparatur berasal dari kata aparat yang berarti petugas pemerintah. Oleh karena itu aparatur berarti para aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi-instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (Adisasmita, 2011). Sumber daya aparatur adalah merupakan faktor penting dalam rangka menerapkan suatu mekanisme kerja yang efisien dan efektif, sebab aparatur atau kepegawaian merupakan subjek dalam setiap aktifitas pemerintahan. Aparaturlah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan, oleh sebab itu agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subjek atau pelakunya harus memiliki kemampuan yang baik pula.

Kaho (1988, dalam Adisasmita, 2011) berpendapat bahwa tanpa manusia pelaksana yang berkinerja baik, maka mekanisme dalam pemerintahanpun tidak dapat berjalan dengan baik. Definisi baik dalam hal ini meliputi mentalitas atau moral dan memiliki kecakapan (keterampilan) yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Mahmudi (2013) kinerja individual dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *knowledge*, *skill*, dan motivasi.

## **Akuntabilitas Kinerja**

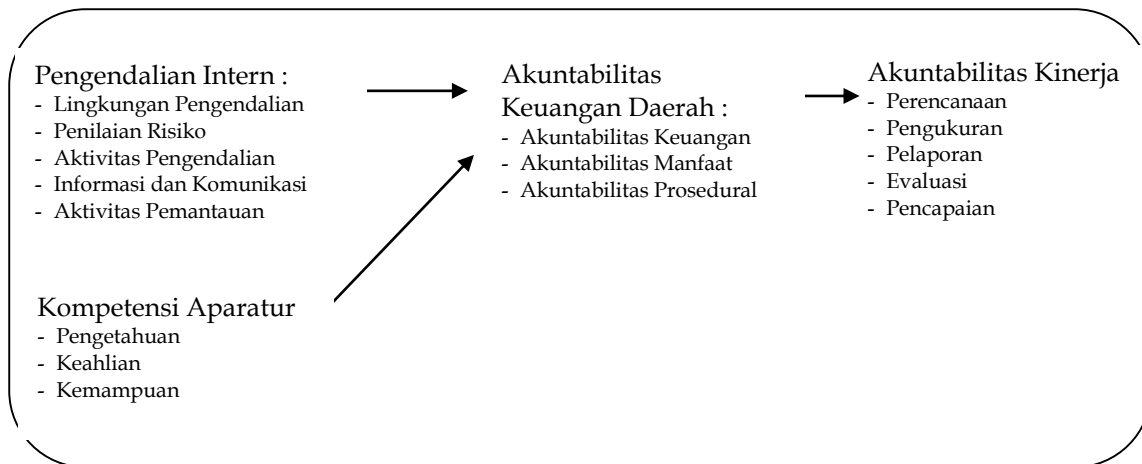
Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja sektor publik yang berkaitan erat dengan manajemen berbasis kinerja berdasarkan hasil capaian kinerja (Mahmudi, 2013). Akuntabilitas kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan sasaran strategis instansi pemerintah melalui pengukurankinerja (Adisasmita, 2011).

## **Hubungan Akuntabilitas Keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja**

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan agar pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya perencanaan yang lebih ekonomis, efisien dan efektif atau lebih dikenal dengan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja dan berbasis *outcome* (Mardiasmo, 2002). Organisasi secara hukum dituntut memenuhi akuntabilitas kinerja yang telah dicapainya dengan mengefektif dan efisien proses pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban public (Bastian, 2014). Penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, akuntabilitas keuangan pada suatu instansi dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja (Rofika & Ardianto, 2014).

## **Kerangka Pemikiran Teoritis**

Secara teori, design kerangka pemikiran yang dapat dibangun berdasarkan teori yang ada pada penelitian ini tergambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

## METODE

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain (Dachlan, 2014). Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada pengelola keuangan, yaitu Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Staf Keuangan pada masing-masing SKPD yang ada di Kota Jambi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah didokumentasikan oleh pihak Inspektorat Kota Jambi berupa data nilai LAKIP SKPD se-Kota Jambi.

### Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi (Sugiono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Jambi yang berjumlah 38 SKPD. Keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel (sampel penuh).

### Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpulkan melalui kuesioner dengan skala ordinal terlebih dahulu diubah menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval (MSI)*. Selanjutnya dilakukan uji statistik dengan menggunakan *software* pengolah data SPSS 20 for Windows.

### Uji Validitas

Untuk menguji apakah instrument kuesioner yang digunakan valid atau tidak, dilakukan uji validitas instrument dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir jawaban responden terhadap total skor (Sugiono, 2017).

### **Uji Realibilitas**

Untuk menguji tingkat konsistensi instrument kuesioner dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama, dilakukan uji reliabilitas (Sugiono, 2017).

### **Uji F (Uji Simultan)**

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Sulistiyo, 2011). Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima, kesimpulannya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak, kesimpulannya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### **Uji t (Uji Parsial)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Sulistiyo, 2011). Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=5$  persen) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima, kesimpulannya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak, kesimpulannya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### **Analisis Jalur**

Analisis jalur merupakan prosedur empiris yang digunakan untuk menguji keeratan kausalitas variabel yang diteliti (Dachlan, 2014). Analisi Jalur digunakan untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga dapat diketahui jalur mana yang paling tepat dan singkat bagi variabel independent menuju variabel dependen akhir melalui besaran angka koefisiensi masing-masing variabel (Sugiono, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### ***Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah***

Secara ringkas hasil pengujian variabel Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Variabel	<i>Adjusted R Square</i>	Uji F	Uji t	
		<i>Sig</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Sig</i>
Pengendalian Intern	0,828	0,000	0,483	0,023
Kompetensi Aparatur			0,448	0,034

Sumber: Output SPSS, data diolah

Berdasarkan Tabel 1, secara simultan variabel Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah sebesar 82,8%. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,828 dan nilai *Sig* Uji F sebesar 0,000 atau dibawah 0,05. Secara parsial, variabel Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah sebesar 48,3%. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Standardized Coefficients* sebesar 0,483 dan nilai *Sig* Uji t sebesar 0,023 atau dibawah 0,05. Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah sebesar 44,8%. *Standardized Coefficients* sebesar 0,448 dan nilai *Sig* Uji t sebesar 0,034 atau dibawah 0,05.

#### ***Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah***

Secara ringkas hasil pengujian variabel Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Variabel	<i>Adjusted R Square</i>	Uji F	Uji t	
		<i>Sig</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Sig</i>
Pengendalian Intern	0,865	0,000	0,205	0,262
Kompetensi Aparatur			0,740	0,000

Sumber: Output SPSS, data diolah

Berdasarkan Tabel 2, secara simultan variabel Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 86,5%. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,865 dan nilai *Sig* Uji F sebesar 0,000 atau dibawah 0,05. Secara parsial, variabel Pengendalian Intern berpengaruh tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 20,5%. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Standardized Coefficients* sebesar 0,205 dan nilai *Sig* Uji t sebesar 0,262 atau diatas 0,05. Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebesar 74%. *Standardized Coefficients* sebesar 0,740 dan nilai *Sig Uji t* sebesar 0,000 atau dibawah 0,05.

**Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Secara ringkas hasil pengujian variabel Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

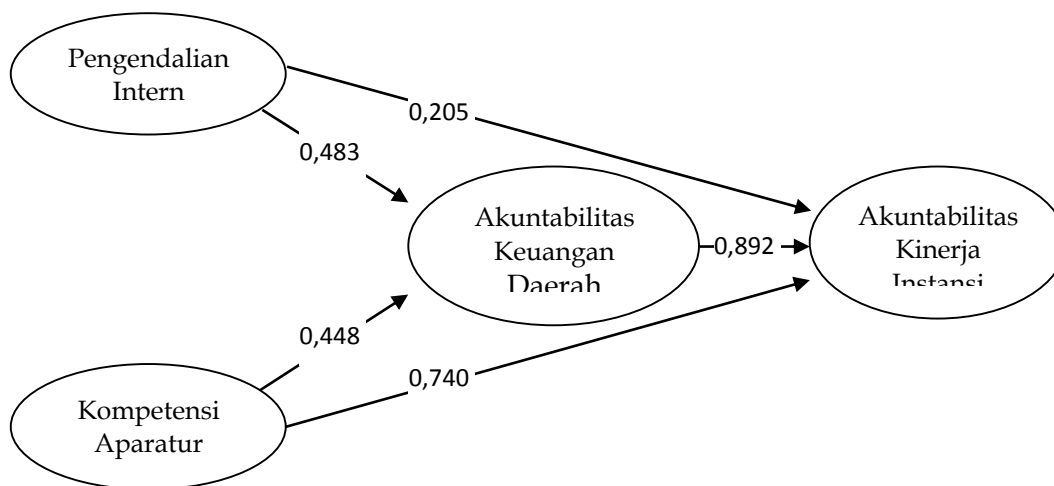
Variabel	R	Uji t	
		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Sig</i>
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0,892	0,892	0,000

Sumber: Output SPSS, data diolah

Berdasarkan Tabel 3, variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 89,2%. Hal ini dapat dilihat dari nilai *R* atau *Standardized Coefficients* sebesar 0,892 dan nilai *Sig Uji t* sebesar 0,000 atau dibawah 0,05.

**Koefisiensi Jalur**

Koefisiensi jalur menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan nilai *Standardized Coefficients* masing-masing variabel. Besarnya nilai koefisiensi jalur berdasarkan uji statistik dilihat sebagai berikut :



Sumber: Output SPSS, data diolah

**Gambar 2. Koefisiensi Jalur**



Dari nilai koefisiensi jalur pada Gambar 2, dapat dilanjutkan dengan menghitung besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung masing-masing variabel sebagai berikut:

**Tabel 4. Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung**

Keterangan	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung
PI → APKD	0,483	-
KA → APKD	0,448	-
PI → AKIP	0,205	-
KA → AKIP	0,740	-
PI → APKD → AKIP	-	$0,483 \times 0,892 = 0,431$
KA → APKD → AKIP	-	$0,448 \times 0,892 = 0,400$

Sumber: Output SPSS, data diolah

Dari Tabel 4, diketahui bahwa Pengendalian Intern memiliki pengaruh tidak langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh langsung ( $0,431 > 0,205$ ). Artinya terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Akuntabilitas Keuangan Daerah. Sedangkan Kompetensi Aparatur memiliki pengaruh langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung ( $0,740 > 0,400$ ). Artinya pengaruh tidak langsung Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Akuntabilitas Keuangan Daerah tidak signifikan.

## Pembahasan

### *Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah merupakan serangkaian dari kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan proses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh pengendalian intern yang memadai dan memiliki aparatur yang kompeten dalam bidang yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kota Jambi. Dengan bekal latar belakang Pendidikan yang rata-rata strata satu (S1) dan memiliki masa kerja yang lebih dari 10 tahun serta pengendalian intern yang memadai, aparatur pengelola keuangan daerah terbukti mampu menciptakan akuntabilitas keuangan yang menjadi tuntutan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Soleha (2013) menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan atas akuntabilitas keuangan. Hasil ini juga didukung oleh Rozi et al. (2017) bahwa Pengetahuan PPK SKPK, Keterampilan, dan Pengawasan

Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugeng (2014) bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kediri.

Pengaruh positif dari pengendalian intern dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Jambi dapat dilihat dengan adanya peningkatan perolehan opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Daerah dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Keuangan Daerah merupakan hasil akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2015, LHP Laporan Keuangan Daerah Kota Jambi memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer* dari BPK RI. Sedangkan tahun sebelumnya, 2012-2014 memperoleh Opini WDP. Dalam hal terlihat terjadi penurunan perolehan Opini. Peningkatan dimulai dari tahun 2016, LHP Laporan Keuangan Daerah Kota Jambi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini dapat bertahan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut hingga tahun 2018. Dengan diperolehnya Opini WTP dari BPK selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut ini membuktikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi pada TA 2016-2018 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari penerapan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tujuannya pemerintah Kota Jambi. Selain itu, kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya aparatur pengelola keuangan Pemerintah Kota Jambi juga telah mampu dalam menterjemahkan peraturan-peraturan yang ada dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak terdapat kesalahan yang material.

### ***Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Akuntabilitas Keuangan Daerah***

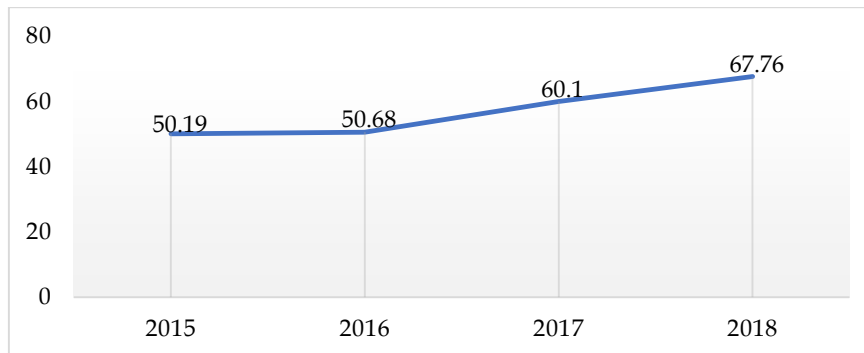
Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik dapat menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang wajib disampaikan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukannya. Akuntabilitas publik dapat diwujudkan pemerintah dengan konsep pengelolaan keuangan *value for money* dan implementasi anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Intern memiliki pengaruh tidak langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh langsung. Artinya pengaruh tidak langsung Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kota Jambi signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna et al. (2015) bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Hal yang berbeda ditemukan oleh Riantiarno & Azlina (2011) bahwa penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Pada variabel Kompetensi Aparatur memiliki pengaruh langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung. Artinya pengaruh tidak langsung Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

melalui Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kota Jambi tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Zirman et al. (2010) bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara langsung berpengaruh positif dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan menghasilkan pengaruh yang negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Jambi oleh Kemenpan RB tahun 2015-2018 selalu memperlihatkan *trend* yang positif atau mengalami peningkatan. Nilai hasil evaluasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Kemenpan RB, data diolah

**Gambar 3. Trend Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi Tahun 2015-2018**

Dari Gambar 3, dapat dilihat dalam setiap tahun terjadi peningkatan nilai hasil evaluasi, meskipun secara kategori belum banyak terjadi perubahan, namun sudah terlihat adanya perbaikan nilai dalam setiap tahunnya. Tahun 2016 meningkat menjadi 50,68 dari tahun 2015 sebesar 50,19. Dalam 2 tahun ini nilai yang diperoleh masih dalam kategori CC atau Cukup. Kategori ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Jambi cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, serta perlu banyak perbaikan namun tidak mendasar.

Pada tahun 2017 nilai SAKIP Kota Jambi meningkat menjadi 60,10, dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 67,76. Dalam 2 tahun ini masuk dalam kategori B atau Baik. Kategori ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Jambi sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan masih diperlukan sedikit perbaikan.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai bahwa secara simultan variabel Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Secara parsial, variabel Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Pengendalian Intern memiliki pengaruh tidak langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh langsung terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Kompetensi Aparatur memiliki pengaruh langsung yang

lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arens, A. A., Elder, R J, & Beasley, M. S. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- BPK RI. (2019a). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2019*. <https://www.bpk.go.id/ihps#>
- BPK RI. (2019b). *Kota Jambi Raih Kembali Opini WTP atas LKPD Kota Jambi TA 2018*. <https://jambi.bpk.go.id/?p=17385>
- Dachlan, U. (2014). *Panduan Lengkap Structural Equation Modeling*. Semarang: Lentera Ilmu.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. (2008). *Auditing; Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Riantiarno, R., & Azlina, N. (2011). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)*. (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Rofika, & Ardianto. (2014). *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabup. Jurnal Akuntansi, 2(2), 197-209*.
- Rozi, M., Ibrahim, R., & Abdullah, S. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Keterampilan, Dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Kabupaten Aceh Barat)*. *Jurnal Akuntansi*

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 6(1), 51-60.  
<https://doi.org/10.1038/nrc2618>

- Soleha, N. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kabupaten/Kota Propinsi Banten*. *Jurnal Etikonomi*, 13, 21-34.
- Sugeng. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten kediri*. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 16-26.
- Sugiono. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiyono, J. (2011). *6 Hari Jago SPSS 17*. Yogyakarta: CV. Cakrawala.
- Wiguna, B. S., Yuniartha, G. A., Ari, N., & Darmawan, S. (2015). *Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Tranparasni Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 3(1).
- Zirman, Darlis, E., & Rozi, R. M. (2010). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Jurnal Ekonomi*, 18. <https://www.neliti.com/id/publications/8780/pengaruh-kompetensi-aparatur-pemerintah-daerah-penerapan-akuntabilitas-keuangan>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*